

Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I'tishom Kubu Raya

DEWA RUCI¹; HENRI PRASETYO²

¹IAIN Pontianak

Jl. Letjend Suprpto No.14, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243

E-mai: dewa607@gmail.com (korespondensi)

²Politeknik Negeri Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Laut, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Submit : 2022-08-28

Review : 2022-08-30

Publish : 2022-09-26

Abstract: Islamic boarding schools are educational institutions that expand knowledge in the field of religion. Islamic boarding schools in their educational operations require students to stay in the Islamic boarding school environment. Therefore, it is expected that the manager will provide comfortable facilities and infrastructure to support teaching and learning activities. In facilitating these facilities and infrastructure, Islamic boarding schools are open to receiving donations from Muslims. As one of the manager's responsibilities to donors is to make financial reports that contain all financial transactions of Islamic boarding schools. The records made must comply with the Islamic Boarding School Accounting Guidelines issued by the Indonesian Institute of Accountants and threaten Bank Indonesia. This study aims to examine how financial records are recorded at the Al Itishom Islamic boarding school, and whether the financial reporting of the Islamic boarding school is by the PAP to find out what improvements need to be made to the Islamic boarding school in the accounting field. This study uses descriptive qualitative research methods with interviews, observations, and documentation. The application of the LAP in Islamic boarding school financial reporting is seen from the aspects: of use and measurement, presentation, and use. The findings of this study indicate that the Al I'tishom Islamic Boarding School still applies financial reporting following the LAP.

Keywords: *Islamic Boarding School Accounting Guidelines, Financial Reporting, Recognition and Measurement, Presentation, Disclosure.*

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang sangat besar dan beraneka, serta mempunyai daerah yang sangat luas. Dengan luas wilayah yang sangat besar, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang sangat banyak kemampuan mumpuni dan tentu saja harus ditopang dengan akhlak yang baik.

Untuk memiliki kemampuan tentu saja melalui didapat melalui pendidikan formal yang sudah di canangkan pemerintah. Selain itu, ada juga lembaga pendidikan lain yang memfokuskan pada pendidikan akhlak melalui pendalaman agama yaitu pondok pesantren yang ditujukan kepada generasi muslim. Pasantren dianggap sebagai lembaga yang sangat tepat bagi generasi untuk memperdalam agama, sehingga diharapkan

dengan pengetahuan agama yang baik dapat membentuk akhlak yang mulia sehingga dikemudian hari, generasi muda ini dapat menjadi orang yang amanah dalam kehidupan dan berefek positif dalam bermasyarakat,

Pondok pesantren Al I'tishom yang berlokasi di Jalan Pembangunan Patok 25, Kab. Kubu Raya menjadi salah satu lembaga pendidikan yang dibangun untuk mewujudkan generasi terbaik bagi kaum muslimin. Pondok ini merupakan pondok tahfiz, namun dalam pelaksanaannya, pelajaran umum tetap diajarkan kepada santri. Sebagai pondok tahfiz, ponpes ini mengutamakan menghafal dan mempelajari Al-Qur'an. Ponpes ini mulai dibangun pada januari 2020 dan pada saat ini sudah memiliki santri sejumlah 100 santri yang berasal

dari berbagai daerah. Sebagai ponpes yang baru berdiri, ponpes ini memiliki banyak donatur dalam pembangunan sarana dan prasarana. Selain itu, pemasukan pondok juga berasal dari SPP yang dibebankan kepada santri yang mampu.

Untuk memenuhi rasa percaya dari pada donatur dan wali santri serta memenuhi kewajiban sebagai lembaga non profit, pengelola ponpes membuat catatan pemasukan dan pengeluaran yang berfungsi sebagai informasi pemasukan dan penggunaan uang. Dan saat ini, pihak pengelola ponpes secara perlahan mulai membangun bisnis ponpes yang diperlukan untuk menopang operasional ponpes, tidak hanya bergantung pada donasi masyarakat. Observasi awal di ponpes Al I'tishom menunjukkan bahwa ponpes saat ini masih dibuat secara sederhana, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan serta sumber daya manusia yang kompeten untuk membuat laporan keuangan. Oleh karena itu, ponpes sebagai salah satu lembaga perekonomian diperlukan pengelolaan keuangan dan pencatatan keuangan yang jelas. Dalam lembaga perekonomian perlu adanya akuntansi yang bertujuan untuk mengelola dan mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan di sebuah lembaga perekonomian (Suherman, 2019).

Akuntansi sangat berperan penting sebagai alat untuk mengelola keuangan selain itu akuntansi juga berperan penting sebagai pertanggungjawaban atas laporan keuangan (Simanjuntak, 2005). Di Indonesia, akuntansi pondok pesantren telah diatur dengan adanya buku pedoman Akuntansi Pondok Pesantren atau biasa disebut Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (Romli, 2018). Ikatan Akuntan Indonesia yang berkerjasama dengan Bank Indonesia bersama-sama membuat Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) yang bertujuan untuk memberdayakan perekonomian di pondok pesantren supaya pondok pesantren dapat menyusun laporan keuangan yang layak dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia

menerbitkan Standar Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI) dengan harapan pondok pesantren mampu membuat dan menerapkan akuntansi sebagai laporan keuangan yang transparan, akuntabilitas, dan efektif sesuai dengan standar akuntansi yang telah dibuat (Niati et al., 2019). Dengan hadirnya Pedoman Akuntansi Pesantren ini sangatlah membantu pondok pesantren untuk menyusun laporan keuangan dan mempermudah dalam mengelola pondok pesantren. Akuntansi pondok pesantren bertujuan jelas yaitu membantu meningkatkan kemakmuran dan keberlangsungan dalam pengelolaan secara profesional (Romli, 2018).

Akuntansi sangatlah penting bagi suatu entitas lembaga tidak terkecuali lembaga pendidikan (Romli, 2018). Karena dengan akuntansi suatu lembaga pendidikan dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih baik dan juga dapat menanggulangi kecurigaan terhadap laporan keuangan suatu lembaga terlebih lembaga pendidikan yang menghimpun dana (Maknunah, 2015). Akan tetapi hal ini tidak diimbangi dengan pelaksanaan pelaporan keuangan di tiap ponpes. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Suherman (2019) yang menjelaskan bahwa salah satu ponpes di Sukabumi belum menerapkan pedoman akuntansi pesantren dan belum menggunakan standar akuntansi yang benar dalam kegiatan pencatatannya hanya membuat laporan keuangan seperti neraca, laporan operasional, laporan arus kas saja. Penelitian Algazali et al. (2021) juga menunjukkan masih kurangnya penerapan akuntansi ponpes di Tidore. Pencatatan yang hanya *single entry* dan laporan keuangan yang sangat jauh dari Pedoman Akuntansi Pesantren. Beranjak dari kedua penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan akuntansi di pondok pesantren masih kurang baik dan kurang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan suatu kejadian dan/atau transaksi ekonomi yang nantinya akan menghasilkan suatu informasi kuantitatif keuangan dan berguna sebagai landasan dalam pengambilan keputusan (Tunggal, 1997). Sedangkan menurut Arif & Wibowo (2004) pengertian akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan suatu transaksi ekonomi suatu entitas atau perusahaan untuk dijadikan suatu informasi. Jadi, Akuntansi adalah suatu proses mencatat segala kejadian dan transaksi ekonomi yang berkaitan dengan keuangan yang nantinya akan diidentifikasi, diklasifikasikan, dan diikhtisarkan sehingga menghasilkan suatu informasi yang nantinya berguna untuk mengambil keputusan dan sebagai laporan keuangan yang ditujukan kepada semua yang terkait dengan entitas atau perusahaan.

Pesantren

Sesuai UU No. 18 Tahun 2019, pesantren atau bisa juga disebut pondok pesantren, dayah, surau, atau meunasah merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhana wa ta'ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah, Islam, keteledanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pedoman Akuntansi Pesantren

Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) merupakan pedoman bagi pesantren untuk menyusun laporan keuangan sesuai

standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. PAP disusun oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren

PAP bertujuan untuk memberikan panduan akuntansi yang tidak mengikat bagi pesantren dalam penyusunan laporan keuangan. PAP diterapkan bagi pesantren yang telah menjadi badan hukum berupa yayasan. Penerapan PAP ke dalam pesantren dapat dilihat dengan 3 (tiga) aspek:

- a. Pengakuan dan Pengukuran. Pengakuan ialah proses mengakui transaksi yang dapat dicatat dalam laporan keuangan. Dan untuk pengukuran ialah proses penetapan nilai nominal mata uang terhadap sebuah transaksi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Sehingga pengakuan dan pengukuran merupakan proses mengakui transaksi beserta penentuan nominal mata uang untuk dicatat di dalam laporan keuangan.
- b. Penyajian. Penyajian merupakan proses menyajikan proses transaksi ke dalam laporan keuangan.
- c. Pengungkapan. Pengungkapan merupakan proses mengungkapkan informasi yang ditampilkan di dalam laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pesantren

Laporan keuangan adalah laporan yang berisikan informasi dari transaksi-transaksi keuangan dalam periode tertentu. Sesuai Pedoman Akuntansi Pesantren (2018), laporan keuangan yang dianggap

lengkap untuk pesantren terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pos-Pos Rekening di Laporan Keuangan Pesantren

Dalam Pedoman Akuntansi Pesantren (2018), pos-pos rekening yang terdapat di laporan keuangan pesantren dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Pos-Pos Rekening di Laporan Keuangan Pesantren

No	Pos-Pos Rekening	Penjelasan
1	Kas dan Setara Kas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kas dan setara kas terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kas rupiah dan mata uang asing; b. Giro pada bank; c. Tabungan; d. Deposit on call; e. Deposito berjangka dengan jangka waktu kurang atau sama dengan tiga bulan. 2. Deposit on call adalah simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.
2.	Piutang usaha	Piutang usaha adalah hak tagih untuk menerima kas dan setara kas dari yayasan pondok pesantren kepada pihak lain.
3.	Persediaan	Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.
4.	Biaya di Bayar di Muka	Biaya dibayar di muka adalah pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan digunakan dalam

No	Pos-Pos Rekening	Penjelasan
		periode yang akan datang. Biaya dibayar dimuka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional yayasan pondok pesantren dan unit usahanya. Misalnya, biaya sewa yang dibayar dimuka.
5.	Aset Lancar Lain	<p>Aset lancar lain adalah aset-aset lancar yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos-pos aset lancar yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen aset lancar lain yang berjumlah material disajikan dalam pos tersendiri. 2. Batasan materialitas penyajian adalah 5% dari total nilai aset.
6.	Investasi Pada Entitas Lain	Investasi pada entitas lain adalah penanaman dana dalam bentuk kepemilikan saham pada entitas lain.
7.	Properti Investasi	<p>Properti investasi adalah tanah dan/atau bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai, atau keduanya, serta tidak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan dalam penyediaan jasa atau tujuan administratif; atau 2. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.
8.	Aset Tetap	Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam

No	Pos-Pos Rekening	Penjelasan
		penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau tujuan administratif; dan digunakan selama lebih dari satu periode.
9.	Aset Tidak Berwujud	Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik.
10.	Aset Tidak Lancar Lain	Aset tidak lancar lain adalah aset-aset tidak lancar yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset tidak lancar yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Penjelasan 1. Komponen aset tidak lancar lain yang berjumlah material disajikan dalam pos tersendiri. 2. Batasan materialitas penyajian adalah 5% dari total nilai aset.
11.	Pendapatan Diterima Di Muka	Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan.
12.	Utang Jangka Pendek/Panjang	1. Utang jangka pendek adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kepada pemberi pinjaman dalam periode sampai dengan dua belas bulan setelah periode pelaporan. 2. Utang jangka panjang adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kepada pemberi pinjaman dalam periode

No	Pos-Pos Rekening	Penjelasan
		lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.
13.	Liabilitas Jangka Pendek Lain	Liabilitas jangka pendek lain adalah liabilitas jangka pendek yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok pos liabilitas jangka pendek yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.
14.	Liabilitas Imbalan Kerja	Liabilitas imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh yayasan pondok pesantren dan unit usahanya kepada pegawai atas jasa yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan.
15	Liabilitas Jangka Panjang Lain	Liabilitas jangka panjang lain adalah liabilitas jangka panjang yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok pos liabilitas jangka panjang yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.
16	Aset Neto Tidak Terikat	Aset neto tidak terikat adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi dana atau hasil operasional yayasan pondok pesantren.
17	Aset Neto Terikat	Aset neto terikat adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan

No	Pos-Pos Rekening	Penjelasan
		tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemberi dana.
18	Penghasilan Dan Beban Tidak Terikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan tidak terikat adalah penghasilan yang tidak ada pembatasan tujuan dan/atau waktu. 2. Beban tidak terikat adalah beban atas aktivitas yang tidak ada pembatasan tujuan dan/atau waktu.
19	Penghasilan Dan Beban Terikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan terikat adalah penghasilan yang ada pembatasan tujuan dan/atau waktu. 2. Beban terikat adalah beban yang aktivitas yang ada pembatasan tujuan dan/atau waktu.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan objek penelitian penerapan PAP dalam pelaporan keuangan pesantren pada tahun 2020. Subjek penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Al I'tishom Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data untuk data primer menggunakan observasi dan wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan data untuk data sekunder menggunakan dokumen. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa penjelasan penerapan akuntansi dan informasi aturan/kebijakan pelaporan keuangan di pesantren. Dan untuk data sekunder yang digunakan merupakan bukti transaksi keuangan dan laporan keuangan yang dibuat pesantren.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian mengadaptasi dari Miles & Huberman (1994) dengan tahapan sebagai berikut.

1. Pengumpulan data. Tahap pengumpulan data merupakan tahap awal dalam menganalisis data untuk mengumpulkan data di Ponpes Al I'tishom Kubu Raya.

2. Reduksi data. Tahapan reduksi data merupakan tahapan dalam melakukan seleksi data yang dikumpulkan, sehingga dapat dipilih dan dipilah data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan dalam penelitian.
3. Penyajian data. Tahapan penyajian data merupakan tahap dalam melakukan penyajian data-data yang telah diseleksi dari data-data yang telah dikumpulkan untuk panrikan kesimpulan.
4. Penarikan/ pemverifikasian kesimpulan. Tahap penarikan/pemverifikasian kesimpulan merupakan tahap untuk menyimpulkan hasil penelitian serta memverifikasi hasil tersebut dengan dukungan dari data yang dikumpulkan dan dianalisis.

Pada bagian penarikan kesimpulan, hasil keputusan di tiap kriteria penerapan PAP terhadap pelaporan keuangan Ponpes Al I'tishom dibagi atas 3 (tiga) keputusan:

1. Sesuai. Keputusan ini menunjukkan bahwa ponpes telah menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan PAP.
2. Tidak sesuai. Keputusan ini menunjukkan bahwa ponpes belum menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan PAP.
3. Diabaikan. Keputusan ini menunjukkan bahwa ponpes belum mempunyai transaksi yang terdapat pada kriteria di PAP.

Dari ketiga keputusan tersebut, jika terdapat keputusan yang tidak sesuai dalam kriteria di PAP maka ditetapkan bahwa ponpes belum menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan PAP.

HASIL

Penerapan PAP pada Ponpes Al I'tishom dilihat dari 3 (tiga) aspek: Pengakuan dan Pengukuran; Penyajian; dan Pengungkapan.

Pengakuan dan Pengukuran

Penerapan PAP pada aspek pengakuan

dan pengukuran dapat dilihat di tabel berikut ini.
Tabel 2. Penerapan PAP pada Aspek Pengakuan dan Pengukuran

No	Kategori	Pengakuan dan Pengukuran	
		Kriteria	Ket
1	Kas dan Setara Kas	1. Kas dan setara kas diakui ada saat terjadinya sebesar nilai nominal.	Sesuai
		2. Kas dalam mata uang asing diakui pada saat diterima sebesar nilai nominal dan dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs transaksi.	Diabaikan
		3. Pada akhir periode, kas dalam mata uang asing dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia pada akhir periode. Selisihnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs.	Diabaikan
		4. Kas dan setara kas dihentikan pengakuannya pada saat digunakan sebesar nilai nominal.	Sesuai
		5. Kas dalam mata uang asing dihentikan pengakuannya pada saat digunakan sebesar nilai nominal dan dirupiahkan menggunakan kurs tanggal transaksi.	Diabaikan
2.	Piutang usaha	1. Piutang usaha diakui pada saat penjualan barang atau jasa kepada pihak lain sebesar jumlah yang ditagihkan.	Sesuai
		2. Penyisihan piutang usaha yang tidak tertagih diakui sebagai beban sebesar jumlah yang dibentuk.	Diabaikan
		3. Piutang usaha dihentikan pengakuannya pada saat dilunasi atau cara penyelesaian lainnya atau saat	Sesuai
3.	Persediaan	1. Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehannya.	Sesuai
		2. Penurunan nilai atas persediaan diakui sebagai kerugian sebesar selisih jumlah tercatat dan nilai realisasi neto.	Diabaikan
		3. Pemulihan atas penurunan nilai persediaan diakui sebagai keuntungan.	Diabaikan
		4. Persediaan dihentikan pengakuannya pada saat dijual atau digunakan.	Sesuai
4.	Biaya Dibayar di Muka	1. Biaya dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan pengeluaran uang namun jasa/manfaat belum diterima, sebesar jumlah yang dibayarkan.	Tidak Sesuai
		2. Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa/manfaat diterima atau habis masanya.	Tidak Sesuai
		3. Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka diakui sebesar nilai yang setara dengan jasa/manfaat yang belum diakui pada periode berjalan.	Tidak Sesuai
5.	Aset Lancar Lain	1. Aset lancar lain diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.	Diabaikan
		2. Aset lancar lain dihentikan pengakuannya pada saat digunakan.	Diabaikan
6.	Investasi Pada Entitas Lain	Jenis Investasi	Perlakuan Akuntansi
		Investasi pada entitas anak	Metode ekuitas
			Diabaikan

No	Kategori	Pengakuan dan Pengukuran		No	Kategori	Pengakuan dan Pengukuran	
		Kriteria	Ket			Kriteria	Ket
		Investasi pada entitas ventura	Metode biaya		Berwujud	perolehan sebesar biaya perolehan yaitu harga beli ditambah biaya lain yang dapat dikaitkan secara langsung dengan perolehan aset tidak berwujud tersebut.	
		Investasi pada entitas asosiasi	Metode biaya			2. Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama masa manfaatnya, dan amortisasi tersebut diakui sebagai beban.	Diabaikan
		Investasi pada aset keuangan	Metode biaya			3. Aset tidak berwujud dihentikan pengakuannya pada saat dilepas kepada pihak lain atau tidak lagi digunakan.	Diabaikan
7.	Properti Investasi	1. Properti investasi diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan.	Diabaikan				
		2. Penyusutan atas properti investasi diakui sebagai beban.	Diabaikan				
		3. Penurunan nilai atas properti investasi diakui sebagai kerugian, dan pemulihan atas penurunan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan.	Diabaikan	10.	Aset Tidak Lancar Lain	1. Aset tidak lancar lain diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.	Diabaikan
		4. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat ditransfer ke pos aset tetap, dijual atau cara pelepasan lain, atau dihapuskan.	Diabaikan			2. Aset tidak lancar lain dihentikan pengakuannya pada saat digunakan	Diabaikan
8.	Aset Tetap	1. Aset tetap diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan.	Sesuai	11.	Pendapatan Diterima di Muka	1. Pendapatan diterima di muka diakui pada saat penerimaan sebesar jumlah yang diterima.	Tidak Sesuai
		2. Penyusutan atas aset tetap diakui sebagai beban.	Tidak Sesuai			2. Pada akhir tahun buku, dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan.	Tidak Sesuai
		3. Penurunan nilai atas aset tetap diakui sebagai kerugian, dan pemulihan atas penurunan nilai aset tetap diakui sebagai keuntungan.	Diabaikan	12.	Utang Jangka Pendek/Panjang	1. Utang jangka pendek/panjang diakui pada saat diterima dana dari pihak lain sebesar jumlah dana yang diterima.	Sesuai
		4. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dijual atau cara pelepasan lain, atau dihapuskan.	Sesuai			2. Utang jangka pendek/panjang dihentikan pengakuannya pada saat dilunasi secara bertahap maupun sekaligus.	Diabaikan
9.	Aset Tidak	1. Aset tidak berwujud diakui pada	Diabaikan	13.	Liabilitas Jangka Pendek	1. Liabilitas jangka pendek lain diakui pada saat terjadi	Diabaikan

No	Kategori	Pengakuan dan Pengukuran	
		Kriteria	Ket
	Lain	1. sebesar jumlah yang harus diselesaikan.	
		2. Liabilitas jangka pendek lain dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan.	Diabaikan
14.	Liabilitas Imbalan Kerja	1. Liabilitas imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada yayasan pondok pesantren dalam suatu periode tertentu.	Sesuai
		2. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pesangon pemutusan kerja diakui sebesar jumlah yang harus dibayarkan.	Diabaikan
		3. Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain diakui sebesar jumlah yang telah didiskonto.	Diabaikan
15.	Liabilitas Jangka Panjang Lain	1. Liabilitas jangka panjang lain diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang harus diselesaikan.	Diabaikan
		2. Liabilitas jangka panjang lain dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan.	Diabaikan
16.	Aset Neto Tidak Terikat	Pada akhir tahun buku, pendapatan tidak terikat dan beban tidak terikat ditutup (<i>closing entries</i>) ke aset neto tidak terikat.	Sesuai
17.	Aset Neto Terikat	1. Pada akhir tahun buku, pendapatan terikat dan beban terikat ditutup (<i>closing entries</i>) ke aset neto terikat.	Sesuai
		2. Aset neto terikat direklasifikasi ke aset neto tidak terikat pada saat terpenuhinya program atau berakhirnya waktu pembatasan.	Diabaikan
1.	Penghasilan	1. Penghasilan tidak	Sesuai

No	Kategori	Pengakuan dan Pengukuran	
		Kriteria	Ket
8.	lan dan Beban Tidak Terikat	1. terikat diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi hak yayasan pondok pesantren.	
		2. Beban tidak terikat diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi beban yayasan pondok pesantren.	Sesuai
19.	Penghasilan dan Beban Terikat	1. Penghasilan terikat diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi hak yayasan pondok pesantren.	Sesuai
		2. Beban terikat diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi beban yayasan pondok pesantren.	Sesuai

Penyajian

Penerapan PAP pada aspek penyajian dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 3. Penerapan PAP pada Aspek Penyajian

No	Kategori	Penyajian	
		Kriteria	Ket
1.	Kas dan Setara Kas	Kas dan setara kas disajikan dalam kelompok aset lancar.	Sesuai
2.	Piutang usaha	1. Piutang usaha disajikan dalam kelompok aset lancar.	Sesuai
		2. Penyisihan piutang usaha disajikan sebagai pos lawan dari piutang usaha.	Diabaikan
3.	Persediaan	Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar.	Sesuai
4.	Biaya dibayar di Muka	Biaya dibayar di muka disajikan dalam kelompok aset lancar.	Tidak Sesuai
5.	Aset Lancar Lain	Aset lancar lain disajikan kelompok aset lancar.	Diabaikan
6.	Investasi Pada Entitas Lain	Investasi pada entitas lain disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.	Diabaikan
7.	Properti	Properti investasi	Diabaikan

No	Kategori	Penyajian	
		Kriteria	Ket
	Investasi	disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.	n
8.	Aset Tetap	Aset tetap disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.	Sesuai
9.	Aset Tidak Berwujud	Aset tidak berwujud disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.	Diabaikan
10.	Aset Tidak Lancar Lain	Aset tidak lancar lain disajikan kelompok aset tidak lancar.	Diabaikan
11.	Pendapatan Diterima di Muka	1. Pendapatan diterima di muka disajikan dalam liabilitas jangka pendek, jika penjualan barang dan jasa akan diberikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.	Tidak Sesuai
		2. Pendapatan diterima di muka disajikan dalam liabilitas jangka panjang, jika penjualan barang dan jasa akan diberikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.	Diabaikan
12.	Utang Jangka Pendek/ Panjang	1. Utang jangka pendek disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek.	Sesuai
		2. Utang jangka panjang disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang.	Diabaikan
13.	Liabilitas Jangka Pendek Lain	Liabilitas jangka pendek lain disajikan kelompok liabilitas jangka pendek.	Diabaikan
14.	Liabilitas Imbalan Kerja	1. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pesangon keputusan kerja disajikan dalam	Sesuai

No	Kategori	Penyajian	
		Kriteria	Ket
		kelompok liabilitas jangka pendek.	
		2. Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang.	Diabaikan
15.	Liabilitas Jangka Panjang Lain	Liabilitas jangka panjang lain disajikan kelompok liabilitas jangka panjang.	Diabaikan
16.	Aset Neto Tidak Terikat	Aset neto tidak terikat disajikan dalam kelompok aset neto.	Sesuai
17.	Aset Neto Terikat	Aset neto terikat disajikan dalam kelompok aset neto dan diklasifikasikan menjadi: 1. Aset neto terikat temporer; 2. Aset neto terikat permanen.	Tidak Sesuai
18.	Penghasilan dan Beban Tidak Terikat	Penghasilan dan beban tidak terikat disajikan dalam kelompok aktivitas tidak terikat.	Tidak Sesuai
19.	Penghasilan Dan Beban Terikat	Penghasilan dan beban terikat disajikan dalam kelompok aktivitas terikat.	Tidak Sesuai
20.	Komponen Laporan Keuangan	Menyajikan laporan keuangan	Sesuai
		1. laporan posisi keuangan	Sesuai
		2. laporan aktivitas	Sesuai
		3. laporan arus kas	Tidak Sesuai
		4. catatan atas laporan keuangan.	Tidak Sesuai

Pengungkapan

Penerapan PAP pada aspek pengungkapan dapat dilihat di tabel berikut ini.
Tabel 3. Penerapan PAP pada Aspek Pengungkapan

No	Kategori	Pengungkapan	
		Kriteria	Ket
1.	Kas dan Setara Kas	Hal-hal yang diungkapkan antara lain:	Sesuai

No	Kategori	Pengungkapan	
		Kriteria	Ket
		1. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas;	
		2. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya (jika ada);	Dibaikan
		3. Pengungkapan lainnya.	Dibaikan
2.	Piutang usaha	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Rincian piutang usaha;	Sesuai
		2. Metode pembentukan penyisihan piutang usaha yang tidak tertagih dan perubahannya di tahun berjalan (jika ada);	Dibaikan
		3. Jumlah penyisihan piutang usaha yang tidak tertagih;	Dibaikan
		4. Pengungkapan lainnya.	Dibaikan
3.	Persediaan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan.	Tidak Sesuai
		2. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasinya (seperti persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi).	Tidak Sesuai
		3. Jumlah persediaan yang diakui sebagai	Tidak Sesuai

No	Kategori	Pengungkapan	
		Kriteria	Ket
		beban tahun berjalan.	
		4. Jumlah penurunan nilai atas persediaan dan pemulihannya.	Dibaikan
		5. Pengungkapan lainnya.	Dibaikan
4.	Biaya Dibayar di Muka	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Rincian biaya dibayar dimuka;	Dibaikan
		2. Pengungkapan lainnya.	Dibaikan
5.	Aset Lancar Lain	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Rincian dari aset lancar lain.	Dibaikan
		2. Pengungkapan lain.	Dibaikan
6.	Investasi Pada Entitas Lain	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk investasi pada entitas lain.	Dibaikan
		2. Rincian investasi pada entitas lain.	Dibaikan
		3. Untuk investasi pada entitas ventura, entitas asosiasi, dan aset keuangan, diungkapkan jumlah dividen dan penerimaan distribusi lainnya yang diakui sebagai penghasilan.	Dibaikan
		4. Untuk investasi pada entitas anak, diungkapkan bagian atas laba atau rugi, penerimaan dividen, dan	Dibaikan

No	Kategori	Pengungkapan	
		Kriteria	Ket
		penerimaan distribusi lainnya.	
7.	Properti Investasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto properti investasi;	Dibaikan
		2. Metode penyusutan yang digunakan;	Dibaikan
		3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;	Dibaikan
		4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (termasuk akumulasi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;	Dibaikan
		5. Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan: • Penambahan; • Pelepasan; • Penurunan nilai; • Penyusutan; • Perubahan lainnya. • Pengungkapan lain.	Dibaikan
8.	Aset Tetap	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan	Tidak Sesuai

No	Kategori	Pengungkapan	
		Kriteria	Ket
		jumlah bruto aset tetap;	
		2. Metode penyusutan yang digunakan;	Tidak Sesuai
		3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;	Tidak Sesuai
		4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (termasuk akumulasi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;	Tidak Sesuai
		5. Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan: • Penambahan; • Pelepasan; • Penurunan nilai; • Penyusutan; • Perubahan lainnya. • Pengungkapan lain.	Tidak Sesuai
9.	Aset Tidak Berwujud	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan;	Dibaikan
		2. Metode amortisasi yang digunakan, yaitu metode garis lurus;	Dibaikan
		3. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;	Dibaikan
		4. Unsur pada laporan aktivitas	Dibaikan

No	Kategori	Pengungkapan	
		Kriteria	Ket
		yang di dalamnya terdapat beban amortisasi aset tidak berwujud;	
		5. Rekonsiliasi jumlah tercatat ada awal dan akhir periode;	Dibaikan
		6. Penjelasan, jumlah tercatat, dan sisa periode amortisasi tidak berwujud yang jumlahnya material bagi yayasan pondok pesantren;	Dibaikan
		7. Pengungkapan lain.	Dibaikan
10.	Aset Tidak Lancar Lain	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Rincian dari aset tidak lancar lain;	Dibaikan
		2. Pengungkapan lain.	Dibaikan
11.	Pendapatan Diterima Di Muka	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Rincian dari pendapatan diterima dimuka.	Dibaikan
		2. Pengungkapan lain.	Dibaikan
12.	Utang Jangka Pendek/Panjang	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Rincian utang jangka pendek/panjang, jumlah, jangka waktu, dan pihak yang memberikan pinjaman.	Tidak Sesuai
		2. Rincian utang jangka panjang yang direklasifikasi ke utang jangka pendek.	Dibaikan
		3. Pengungkapan lain.	Dibaikan
13.	Liabilitas Jangka Pendek	Hal-hal yang diungkapkan antara lain:	Dibaikan

No	Kategori	Pengungkapan	
		Kriteria	Ket
	Lain	1. Rincian dari liabilitas jangka pendek lain.	
		2. Pengungkapan lain.	Dibaikan
14.	Liabilitas Imbalan Kerja	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: Imbalan Pascakerja 1. Imbalan pascakerja iuran pasti <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan. 	Tidak Sesuai
		2. Imbalan pascakerja manfaat pasti <ul style="list-style-type: none"> Penjelasan umum jenis program, termasuk kebijakan pendanaan. Kebijakan akuntansi untuk mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial dan jumlah atas keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui selama periode berjalan. Penjelasan naratif jika menggunakan penyederhanaan dalam mengukur kewajiban manfaat pasti. Tanggal 	Dibaikan

No	Kategori	Pengungkapan	
		Kriteria	Ket
		<ul style="list-style-type: none"> • Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kewajiban manfaat pasti yang menunjukkan keuntungan atau kerugian aktuarial. • Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir aset program. • Total biaya yang terkait dengan program manfaat pasti. • Pengembalian aktual aset program. • Asumsi aktuarial utama. 	
		Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain <ul style="list-style-type: none"> • Sifat imbalan. • Jumlah kewajiban dan status pendanaan pada tanggal neraca. 	Diabaikan
		Imbalan Pesangon Pemutusan Kerja <ul style="list-style-type: none"> • Sifat imbalan. • Kebijakan akuntansi. • Jumlah kewajiban dan status pendanaan pada tanggal pelaporan. 	Diabaikan
15	Liabilitas Jangka Panjang Lain	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian dari liabilitas jangka 	Diabaikan

No	Kategori	Pengungkapan	
		Kriteria	Ket
		panjang lain.	
		2. Pengungkapan lain.	Diabaikan
16	Aset Neto Terikat	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian aset neto terikat temporer dan permanen. 2. Penjelasan pembatasan atas aset neto terkait sifat dan jumlah pembatasan tersebut. 	Tidak Sesuai
17	Penghasilan dan Beban Tidak Terikat	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian dari penghasilan tidak terikat; 2. Rincian dari beban tidak terikat; 3. Aset neto tidak terikat yang berakhir pembatasannya; 4. Pengungkapan lain. 	Tidak Sesuai
18	Penghasilan dan Beban Terikat	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian dari penghasilan tidak terikat; 2. Rincian dari beban tidak terikat; 3. Aset neto terikat yang berakhir pembatasannya; 4. Pengungkapan lain. 	Tidak Sesuai

PEMBAHASAN

Dalam penerapan PAP pada aspek pengakuan dan penerapan ditetapkan bahwa terdapat 3 kategori yang tidak sesuai dengan PAP, yaitu:

1. Kategori 4 mengenai biaya dibayar di muka. Ketidaksihesuaian ini dikarenakan ponpes tidak mengakui pembelian token listrik dan pembayaran sewa

peralatan sebagai biaya dibayar di muka, melainkan langsung diakui sebagai beban pada saat terjadinya transaksi.

2. Kategori 8 mengenai aset tetap pada kriteria 2 terkait pengakuan penyusutan atas aset tetap diakui sebagai beban. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak mengakui penyusutan pada aset tetap yang dimiliki sebagai transaksi keuangan. Sehingga tidak ada pencatatan ataupun perhitungan terkait penyusutan aset tetap.
3. Kategori 11 mengenai pendapatan diterima di muka. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak mengakui pembayaran iuran santri yang dipanjar sampai lebih dari 1 bulan sebagai pendapatan diterima di muka, melainkan diakui keseluruhannya sebagai penghasilan tidak terikat pada saat terjadinya transaksi.

Terkait penerapan PAP pada aspek penyajian ditetapkan bahwa terdapat 6 kategori yang tidak sesuai dengan PAP, yaitu:

1. Kategori 4 mengenai biaya dibayar di muka. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak memasukkan transaksi biaya dibayar di muka ke dalam pos aset lancar, melainkan masuk ke dalam pos beban.
2. Kategori 11 mengenai pendapatan diterima di muka pada kriteria 1 terkait penyajian pendapatan diterima di muka ke dalam liabilitas jangka pendek. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak memasukkan transaksi pendapatan diterima di muka yang jangka waktu pemberian jasanya tidak lebih dari 12 bulan ke dalam pos liabilitas jangka pendek, melainkan masuk ke dalam pos pendapatan.
3. Kategori 17 mengenai aset neto terikat. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak menyajikan aset neto terikat secara terpisah. Ponpes memasukkan aset neto terikat langsung ke dalam pos aset neto tanpa memisahkan ke aset neto terikat temporer dan aset neto terikat permanen.
4. Kategori 18 mengenai penghasilan dan

beban tidak terikat. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak menyajikan penghasilan dan beban tidak terikat ke dalam kelompok aktivitas tidak terikat secara terpisah. Ponpes dalam pelaporan keuangannya tidak menyajikan secara terpisah antara aktivitas terikat dan tidak terikat.

5. Kategori 19 mengenai penghasilan dan beban terikat. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak menyajikan penghasilan dan beban terikat ke dalam kelompok aktivitas terikat secara terpisah. Ponpes dalam pelaporan keuangannya tidak menyajikan secara terpisah antara aktivitas terikat dan tidak terikat.
6. Kategori 20 mengenai komponen laporan keuangan pada kriteria 3 dan 4 terkait penyajian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak menyajikan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ponpes hanya menyajikan laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas, meskipun dalam penyajian yang sederhana.

Penerapan PAP pada aspek pengungkapan ditetapkan bahwa terdapat 3 kategori yang tidak sesuai dengan PAP, yaitu:

1. Kategori 3 mengenai persediaan. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak mengungkapkan kebijakan akuntansi dari persediaan, total jumlah persediaan yang tercatat, dan beban tahunan persediaan yang diakui. Ponpes hanya mencatat beras, minyak, dan bahan makanan lainnya yang dibeli tanpa menghitung jumlah yang telah digunakan. Kebijakan akuntansi dan persediaan pun tidak ada dalam dokumen/laporan yang dibuat ponpes.
2. Kategori 8 mengenai aset tetap. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes hanya mencatat nominal aset tetap yang diperoleh melalui pembelian, sedangkan hibah hanya

- dicatat jumlah unitnya tanpa dimasukkan nominalnya. Terkait kebijakan penyusutan, masa manfaat, dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada aset tetap tidak diungkapkan dan dijelaskan pada dokumen/laporan yang dibuat ponpes.
3. Kategori 12 mengenai utang jangka pendek/panjang. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak mengungkapkan rincian utang yang jangka pendek yang dimiliki akibat beberapa transaksi dalam proses pembangunan ponpes pada dokumen/laporan yang dibuat ponpes.
 4. Kategori 14 mengenai liabilitas imbalan kerja pada kriteria 1 terkait imbalan pascakerja. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak mengungkapkan rincian liabilitas imbalan kerja yang dimiliki akibat tertundanya pembayaran honor pegawai pada dokumen/laporan yang dibuat ponpes.
 5. Kategori 16 mengenai aset neto terikat. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak ada mengungkapkan rincian aset neto terikat yang dimiliki dengan memisahkan antara aset neto terikat temporer dan permanen pada dokumen/laporan yang dibuat ponpes.
 6. Kategori 17 mengenai penghasilan dan beban tidak terikat. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak mengungkapkan rincian penghasilan dan beban secara terpisah antara aktivitas terikat ataupun tidak terikat. Ponpes pun tidak ada menjelaskan batasan terkait penghasilan dan beban tidak terikat pada dokumen/laporan yang dibuat ponpes.
 7. Kategori 14 mengenai penghasilan dan beban terikat. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak mengungkapkan rincian penghasilan dan beban secara terpisah antara aktivitas terikat ataupun tidak terikat. Ponpes pun tidak ada menjelaskan batasan terkait penghasilan dan beban terikat pada dokumen/laporan yang dibuat ponpes.

Dari ketiga aspek yang ditelaah, dapat ditetapkan bahwa Pondok Pesantren Al I'tishom Kubu Raya belum menerapkan pelaporan keuangannya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). Hal tersebut didukung berdasarkan 3 kategori pada aspek pengakuan dan pengukuran, 6 kategori pada aspek penyajian, dan 7 kategori pada aspek pengungkapan yang ditetapkan tidak sesuai dengan penerapan PAP. Pengakuan dan pengukuran menjadi aspek penerapan yang paling banyak sesuai dengan PAP, sedangkan aspek pengungkapan menjadi aspek penerapan yang paling banyak terjadi ketidaksesuaian dengan PAP. Catatan atas laporan keuangan (CALK) yang tidak dibuat oleh ponpes menjadi penyebab utama dari ketidaksesuaian kriteria di PAP. Sehingga tidak banyak informasi pengungkapan yang bisa didapatkan. Aspek penyajian pun mempunyai ketidaksesuaian kedua yang paling banyak. Hal tersebut didasari dari laporan aktivitas dan posisi keuangan yang masih sederhana, dan tidak dibuatnya laporan arus kas. Penyajian sederhana tanpa memperhatikan kaidah akuntansi menjadikan laporan keuangan ponpes kurang informatif dan tidak sesuai standar keuangan. Penjelasan dari ketiga aspek yang ditelaah menunjukkan bahwa ponpes sudah banyak mengakui transaksi keuangan tetapi tidak sepenuhnya disajikan dan diungkapkan secara rinci pada dokumen/laporan yang disusun.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, didapatkan beberapa penyebab Ponpes Al I'tishom Kubu Raya belum menerapkan PAP secara penuh.

- a. Tidak ada pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi/keuangan.
- b. Belum pernah ada pelatihan secara intens yang menjelaskan penggunaan PAP dalam standar keuangan di ponpes.

Belum adanya kebijakan/aturan yang menjelaskan mekanisme/prosedur dalam pelaporan keuangan ponpes.

SIMPULAN

Pelaporan keuangan di Pondok Pesantren Al I'tishom dinyatakan belum sesuai dengan PAP. Penerapan pelaporan keuangan berdasarkan aspek 1. pengakuan dan pengukuran, 2. penyajian, dan 3. pengungkapan ditetapkan masih terdapat ketidaksesuaian dengan PAP. Pengungkapan dan penyajian menjadi aspek yang paling banyak PR yang perlu diperbaiki.

DAFTAR RUJUKAN

- Algazali, B. Y., Hasan, M. H., & Madjodjo, F. (2021). Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Harisul Khairaat Tidore. *Jurnal Akbar Juara*, 6(5), 42–54.
- Arif, A., & Wibowo. (2004). *Akuntansi untuk Bisnis Usaha Kecil dan Menengah*. Gramedia Widiasarana Indonesia. <https://doi.org/979732719>
- Bank Indonesia, & Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pedoman Akuntansi Pesantren* (1st ed.).
- Maknunah, J. (2015). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Lembaga Pendidikan. *Jurnal Informatika STIKI*, 05(ISSN 2087-0256), 27–29.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. In *SAGE Publications* (2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Niati, A., Suhardjo, Y., Wijayanti, R., & Hanifah, R. U. (2019). Pelatihan Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pesantren bagi Pengelola Yayasan Pondok Pesantren X di Kota Semarang. *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(1), 76.
- <https://doi.org/10.26714/jsm.2.1.2019.76-79>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pub. L. No. 18 (2019).
- Romli, M. (2018). Peluang dan Tantangan Penerapan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI) di Indonesia. *Ekomadania*, 2, 35–51.
- Simanjuntak, B. H. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 1–15.
- Suherman, L. P. (2019). Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren Bagi Pondok Pesantren Al-Matuuq Sukabumi. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2), 65–70. <https://doi.org/10.18196/jati.020220>
- Tunggal, A. W. (1997). *Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan*. Rineka Cipta.